

**BUDAYA POLITIK MASYARAKAT BETAWI
CENGKARENG (*BECENG*)**

**(Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 2017)**



REZANDI SABILLA

4115133771

**Skripsi Ini Ditulis Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mendapatkan Gelar
Sarjana Pendidikan**

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2017

ABSTRAK

Rezandi Sabilla, *Budaya Politik Masyarakat Betawi Cengkareng (study kasus Pemilihan Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2017)*

Skripsi, Jakarta : **Program Study Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, 2017**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai Budaya Politik Masyarakat Betawi Cengkareng pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan terhitung mulai dari 10 Februari hingga 30 April 2017 diwilayah Kecamatan Cengkareng.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap 10 informan yang dipilih secara acak dan dua orang *key informan* yang menjadi pemegang kunci dari wawancara serta wawancara juga dilakukan terhadap satu *expert opinion*, yaitu orang yang ahli dibidangnya. Sedangkan studi dokumentasi dilakukan terhadap data-data yang telah diminta dan dirangkum dari kantor Kecamatan Cengkareng, KPUD Jakarta dan BPS DKI Jakarta serta data penunjang lainnya sebagai data pelengkap.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa masyarakat Betawi Cengkareng, pertama orientasi politik masyarakat Betawi Cengkareng sudah baik melalui tiga

aspek yang ditanyakan, yaitu aspek Kognitif meliputi pengetahuan, aspek Afektif meliputi perasaan, dan Evaluatif meliputi tindak lanjut dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Kedua, angka partisipasi masyarakat Cengkareng sudah terbilang tinggi. Pada Pilkada DKI Jakarta putaran pertama angka partisipasi masyarakat Cengkareng sebesar 78% dan untuk putaran kedua sebesar 79,3%.

Kesimpulan dari hasil penelitian adalah masyarakat Betawi Cengkareng lebih condong masuk ke tipe budaya politik partisipan, hal tersebut dikarenakan tingkat pengetahuan, perasaan, dan tindak lanjut terhadap sistem politik pada saat Pilkada sudah sangat baik, karena adanya faktor input dan output terhadap sistem politik serta penggunaan hak politik yang sudah sangat baik.

Kata Kunci: Orientasi Politik, Budaya, Partisipasi Politik

ABSTRACT

Rezandi Sabilla, *Political Culture of Betawi Cengkareng Community (study case of elections DKI Jakarta 2017)*

Scripton, Jakarta: **Pancasila and Citizenship Study Program, Department of Social Political Science, Faculty of Social Sciences, Jakarta State University, 2017**

This study aims to obtain information on the Political Culture of Betawi Cengkareng Society in the elections of DKI Jakarta 2017. This study used case study method with qualitative approach. This research was conducted for three months starting from 10 February until 30 April 2017 in Cengkareng District.

Technique of data collecting is done by interview and documentation study. Interviews were conducted on 10 informants selected at random and two key informants who became key holders of the interviews and interviews were also conducted on one expert opinion, namely those skilled in the art. While documentation study conducted on the data that has been requested and summarized from the office of District Cengkareng, KPUD Jakarta and BPS DKI Jakarta and other supporting data as complementary data.

From the result of the research, it is found that the Betawi Cengkareng community, the first political orientation of Betawi Cengkareng community has been good through three aspects that are asked, that are Cognitive aspect include knowledge, Affective aspect includes feelings, and Evaluative includes follow up in elections of DKI Jakarta 2017. Secondly, Cengkareng is already high. In the

first election of Jakarta Capital City, the first round participation rate of Cengkareng was 78% and for the second round was 79.3%.

The conclusion of the research is Betawi Cengkareng society is more inclined to enter the type of participant political culture, it is because the level of knowledge, feelings and follow up to the political system at the time of elections have been very good, because the input and output factors to the political system and the right Politics that has been very good.

Keywords: Political Orientation, Culture, Political Participation



Building
Future
Leaders

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telp. (62-21) 29266139, 29266138, 4890046 Ext. 203, 47882930, 4890108, 4753655,
Fax. (62-21) 47882930, 4753655

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab/ Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Jakarta



Dr. Muhammad Zid, M.Si.
NIP. 19630412.199403.1.002

TIM PENGUJI

No.	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	<u>Drs. H. Suhadi, M.Si.</u> Ketua		1-8-2017
2.	<u>Dwi Afrimetty, S.H., M.H.</u> Sekretaris		1-8-2017
3.	<u>Dr. Komarudin, M.Si.</u> Pembimbing I		1-8-2017
4.	<u>Wuri Handayani, M.Si.</u> Pembimbing II		1-8-2017
5.	<u>Dr. Japar, M.Si.</u> Penguji Ahli		9-8-2017

Tanggal Lulus : 26 JULY 2017

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rezandi Sabilla

No. Registrasi : 4115133771

Menyatakan bahwa skripsi yang disusun benar adanya tanpa adanya unsur plagiarisme dan beberapa kutipan yang bisa dipertanggungjawabkan.

Tanggal Lulus : 26 Juli 2017



LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI/KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rezandi Sabilla
Nomor Registrasi : 4115133771
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : Ilmu Sosial
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif** atas skripsi yang berjudul:

“Budaya Politik Masyarakat Betawi Cengkareng (study kasus Pemilihan Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2017)”

Beserta Perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti eksklusif ini, Universitas Negeri Jakarta bebas menyimpan media/diformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, mempublikasikan skripsi saya selama dicantumkan nama saya sebagai penulis dan pemilik hak cipta.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di Jakarta, 31 Juli 2017



Rezandi Sabilla

LEMBAR MOTO DAN PERSEMBAHAN

- Moto

“Selalu siap sejak dilahirkan, menjadi pribadi yang berguna untuk orang disekitarnya”

- Persembahan

Skripsi ini kupersembahkan untuk Mamahku tercinta, Memi Diyarti, yang telah melahirkanku ke dunia ini dengan mempertaruhkan nyawanya dan Bapakku, Eko Purwanto, yang selalu menjadikanku anak yang baik. Serta ketiga adikku, Shafira Salsabillah, Firda Ramadanty, Haykal Muhammad Siddiq, yang selalu memberikan senyum keceriaan dikalah hatiku gundah.

Tak lupa untuk teman-temanku, juga Negaraku Tercinta Indonesia. Aku dilahirkan dan dibesarkan di tanah ini. Aku bangga menjadi Pemuda Indonesia.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas hidayah dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam tetap selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun dari dunia kegelapan menuju dunia yang terang benderang. Semoga safa'atnya selalu menyertai setiap umatnya.

Salam ikhromah semoga juga tercurahkan kepada seluruh kekasih Allah dan para hamba yang selalu setia kepada-Nya. Beribu ucapan dan rasa syukur tak mampu mewakili prtunjuk dan rahmat yang telah Allah berikan kepada penulis atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Sebagai manusia biasa, penulis pastinya menyusun skripsi ini dengan banyak kekurangan dan kesalahan. Penulis menyadari hal tersebut seraya memohon kepada Allah SWT untuk memberikan pertolongannya supaya terselesaikan skripsi dengan judul: “***BUDAYA POLITIK MASYARAKAT BETAWI CENKARENG (studi kasus Pemilihan Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2017)***”

Selanjutnya penulis menyadari penyusunan skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan tulus penulis sampaikan kepada Bapak Dr. M. Zid., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. Bapak Drs. H. Suhadi, M.Si., selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. Bapak Dr. Komarudin, M.Si.,

selaku dosen pembimbing I dan Ibu Dra. Wuri Handayani, M.Si., selaku dosen pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing peneliti selama menyusun skripsi. Segenap Dosen Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta yang telah memberikan seluruh ilmunya. Bapak Mochammad Khalis yang telah bersedia untuk memberikan pendapatnya dalam penelitian ini sebagai *Expert Opinion* Bapak Achmad Sadeli dan Bapak Achmad Rifayi selaku anggota Betawi Cengkareng dan sekaligus menjadi *Key Informan*. Kak Desih, Cang Haji, Desmon yang telah memabntu dengan menjadi Informan dalam penelitian ini. Kedua Orang Tua, Ibu Memi Diyarti dan Bapak Eko Purwanto, yang dengan cinta dan penuh kasih sayang selalu membimbing anak mu yang bandel dan sering jarang pulang. Serta ketiga adikku, Shafira Salsabillah, Firda Ramadanty, Haykal Muhammad Siddiq. Teman-teman seperjuangan Yulyani, Linda, Uyuy, Husnul, Haikal, Vicka, Acong, Dini yang telah memberikan masukan baik dari segi materi dan mental. Sahabat Alternative SMA saya: Tommy, Idris, Acing yang selalu ada disaat saya terpuruk galau memikirkan skripsi. Kepada Bang Iphoel dan Uminya Vicka terima kasih atas bantuannya dalam mencetak skripsi ini. Rekan-rekan pers WikiDPR. Serta semua pihak turut berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Pada akhirnya penulis mengakui sendiri masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Meski penulis berharap bahwa karya ini bisa bermanfaat untuk semua pihak.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	,ii
LEMBAR PENGESAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	viii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL DAN BAGAN	xvi
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Fokus Penelitian.....	6
D. Pertanyaan Penelitian	7

E. Kegunaan Penelitian	7
II. ACUAN TEORETIK	
A. Budaya Politik.....	8
B. Tipe-tipe Budaya Politik.....	10
C. Budaya politik di Indonesia	15
D. Partisipasi Politik.....	19
E. Bentuk-bentuk Partisipasi	22
F. Pemilihan Umum	24
III. METODE PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian.....	30
B. Metode Penelitian	30
C. Penentuan “ <i>Setting</i> ”	31
D. Teknik Pengambilan Data	31
a. Wawancara.....	31
b. Dokumen/Arsip.....	34
E. Teknik Kalibrasi Keabsahan Data	35

a. Perpanjang Pengamatan.....	35
b. Triangulasi Data.....	35
c. Kecukupan Referensial.....	36
F. Teknik Analisis Data	36

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian	38
a. Keadaan Geografis.....	38
b. Pemerintahan	39
c. Kependudukan dan Ketenagakerjaan.....	41
d. Kesejahteraan Sosial dan Perekonomian	42
B. Sumber Informasi	42
C. Temuan Penelitian	44
a. Orientasi Politik Masyarakat Betawi Cengkareng.....	44
b. Bentuk Budaya Politik Masyarakat Betawi Cengkareng.....	46
c. Bentuk Partisipasi Masyarakat Betawi Cengkareng.....	47
d. Pengaruh Sistem Religi dalam Partisipan Masyarakat Betawi Cengkareng	53
D. Pembahasan	56

E. Keterbatasan Penelitian.....	60
---------------------------------	----

V. KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	61
--------------------	----

B. Implikasi	63
--------------------	----

C. Saran	63
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA	64
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL DAN BAGAN

TABEL 1	39
TABEL 2	40
TABEL 3	40
TABEL 4	41
TABEL 5	42
TABEL 6	43
TABEL 7	49
TABEL 8	52
TABEL 9	53
BAGAN 1	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 17.508 pulau dan terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Bisa dibayangkan Indonesia adalah negara yang sangat heterogen. Luas wilayah Indonesia terbentang mulai dari Sabang hingga Merauke. Jumlah penduduk Indonesia per 30 Juni 2016 menurut Badan Pusat Statistik adalah 257.912.349 jiwa. Penduduk tersebut mempunyai latar belakang dan budaya yang berbeda. Tak ayal sebagai bangsa yang sangat multikultural ini nilai-nilai toleransi harus dijunjung tinggi agar tak memicu konflik yang ada.

Melihat realita masyarakat Indonesia yang beraneka ragam (heterogen) tentunya tidak mudah untuk menciptakan kondisi yang sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Pasti ada yang menerima dan ada juga yang menolaknya. Begitu juga dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selalu ada pro dan kontra. Salah satunya adalah kebijakan mengenai Pilkada. Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Dengan adanya Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentu saja membuat masyarakat turut andil langsung terhadap kegiatan partisipasi politik.

Hal tersebut juga membuat asas desentralisasi kekuasaan dan kesempatan bagi masyarakat untuk membangun serta menentukan siapa pemimpin daerah yang sesuai dengan keinginannya. Partisipasi masyarakat ditingkat daerah maupun pusat juga berarti memengaruhi proses kebijakan publik, selain itu diharapkan sekaligus sebagai wadah untuk menentukan pemimpin daerahnya masing-masing, baik ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kotamadya.

Dampak secara langsung dari diberlakukannya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 bagi DKI Jakarta adalah pada tanggal 8 Agustus 2007 untuk pertama kalinya DKI Jakarta melaksanakan Pilkada secara langsung. Selanjutnya, dewasa ini pemilihan kepala daerah sudah resmi menjadi serentak. KPU memberikan batas tenggat kepada semua kepala daerah untuk mempersiapkan menghadapi Pilkada serentak. Ada beberapa gelombang dalam Pilkada serentak ini dan DKI Jakarta masuk dalam gelombang 2 bersamaan dengan Pilkada Banten dan daerah lainnya.

DKI Jakarta masuk pada gelombang kedua yang berarti dilaksanakan pada Tahun 2017. Sejak bulan Maret 2016 KPU DKI Jakarta telah sibuk menyiapkan Pilgub DKI Jakarta. Adapun jadwal yang diresmikan oleh KPU DKI Jakarta. 19 September-21 September 2016, Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur. 22 Oktober 2016, Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur. 26 Oktober 2016-11 Februari 2017, Masa Kampanye dan Debat Publik. 12 Februari-14 Februari 2017, Masa Tenang. 15 Februari 2017, Pemungutan dan Penghitungan Suara. 16 Februari-27 Februari 2017,

Rekapitulasi Suara. 8 Maret-10 Maret 2017, Penetapan Calon Terpilih Tanpa Sengketa.¹

Namun demikian, pro dan kontra masih saja ada. Terlebih dizaman yang serba canggih seperti ini, informasi untuk mencari tahu berita tentang Pilkada DKI Jakarta Sangatlah mudah. Tentunya Jakarta lebih disorot ketimbang Pilkada Lainnya karena alasan Ibukota. Terlebih, posisi gubernur DKI Jakarta dianggap sebagai jabatan yang sangat strategis. Padahal, pada tahun ini pilkada dilaksanakan secara serentak diberbagai daerah. Banyak isu yang beredar selama masa kampanye. Bahkan warga diluar Jakarta tak mau kalah dalam mengambil kesempatan ini. Memang jika dilihat dengan seksama, Pilkada DKI Jakarta tahun ini sangat panas. Ada 3 calon dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

1. Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni
2. Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat
3. Anies Baswedan-Sandiaga Uno

Melihat fenomena tersebut tidak mengherankan jika pertumbuhan masyarakat di satu tempat telah memperlihatkan bahwa semakin kompleksnya masyarakat di satu sisi memperlihatkan adanya persaingan yang sangat ketat dari lainnya, kebutuhan yang semakin banyak jumlah ragamnya.

Demikian pula dengan kehidupan masyarakat daerah sangat dipengaruhi oleh budaya politik. Hal ini sejalan dengan pendapat Almond dan Verba yang dikutip oleh Nazaruddin Sjamsuddin, Budaya Politik ialah sebagai sikap

¹ Sumber Data KPU DKI Jakarta

orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, serta terhadap peranan warga negara di dalam sistem tersebut.²

Dari uraian diatas, maka peranan masyarakat Betawi dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, mereka mengangkat masalah isu etnis dan isu agama. Hal ini diselaraskan oleh Melvillie J. Herkovits dan Bronislaw M dalam Soerjono Soekanto, pola di dalam masyarakat ditentukan adanya budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut (*Cultural determinate*). Dengan adanya *Cultural determinant* tersebut, ia telah memengaruhi cara pandang, keyakinan dan kepatuhan bagi suatu masyarakat.³

Mengenai permasalahan budaya politik yang ada di Indonesia telah ada beberapa peneliti yang meneliti penelitian budaya politik Indonesia. Menurut Albert Widjaja budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang terdiri dari ide, pengetahuan, adat istiadat, tahayul dan mitos. Kesemuanya ini dikenal dan diakui sebagian besar masyarakat. Budaya politik tersebut memberi rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain. Albert Widjaja menyamakan budaya politik dengan konsep ideologi yang dapat berarti sikap mental, pandangan hidup, dan struktur pemikiran. Budaya politik menurutnya menekankan ideologi yang umum berlaku dimasyarakat, bukan ideologi perorangan yang sifatnya sering khusus dan beragam.

Studi budaya politik di Indonesia pernah dilakukan oleh para ilmuwan dari barat diantaranya yaitu Herbert Feith dan Clifford Geertz. Herbert Feith, mengemukakan bahwa Indonesia memiliki dua budaya politik yang dominan,

² Nazaruddin Sjamsuddin. 1991. *Profil Budaya Politik Indonesia*. Jakarta. PT Pustaka Utama Graffiti. Hlm 21

³ Soerjono Soekanto. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. PT Grafindu Persada. Hlm 35

yaitu *aristokrasi Jawa dan wiraswasta islam*. Sedangkan menurut Clifford Geertz yang dikutip oleh Komarudin Sahid, dalam masyarakat Jawa terdapat tiga subkebudayaan yaitu *santri, abangan, priyayi*. Sementara itu, Hildred Greetz, mengelompokan masyarakat kepada tiga subkebudayaan yang disebut *sociocultural types* menjadi petani pedalaman Jawa dan Bali, Masyarakat Islam Pantai, dan Masyarakat pegunungan⁴.

Perkembangan pada subbudaya politik, dipengaruhi oleh dua faktor dominan, yakni adat istiadat dan sistem kepercayaan (agama). Adat dan agama memainkan peranan yang besar dalam proses penyerapan dan pembentukan pandangan masyarakat tentang kekuasaan atau simbol-simbol yang ada disekitarnya. Adat dan agama telah mempengaruhi atau memberi bentuk pola sikap atau pandangan individual anggota masyarakat mengenai peranan yang mungkin dimainkannya dalam sistem politik. Termasuk masyarakat asli DKI Jakarta. Suku asli Jakarta adalah suku Betawi. Suku Betawi mendiami seluruh wilayah Jakarta, termasuk didaerah Cengkareng. Masyarakat Betawi di sini dinamakan BECENG atau Betawi Cengkareng. Dilihat dari segi geografis masyarakat beceng terbentang mulai dari jalan Daan Mogot hingga ke Kembangan dan Kapuk atau sekitaran Cengkareng. Masyarakat Betawi Cengkareng masih kental mempertahankan nilai tradisi yang ada. Hal ini bisa dibuktikan dari adanya sambung menyambung silaturahmi antar sesama Betawi pada saat hari raya lebaran.

⁴ Komarudin Sahid. 2011, *Memahami Sosiologi Politik*. Ghalia Indonesia. Bogor. hlm. 160

Berdasarkan pemikiran dan uraian diatas, adanya ketertarikan untuk menelisik kebudayaan politik yang ada di dalam masyarakat Etnis Betawi di wilayah Cengkareng. Maka dari itu, hal tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: BUDAYA POLITIK MASYARAKAT BETAWI CENKARENG : STUDI KASUS PILKADA DKI JAKARTA 2017

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang akan dirumuskan adalah:

1. Bagaimana orientasi politik masyarakat Betawi Cengkareng pada Pilkada DKI Jakarta 2017?
2. Bagaimana bentuk budaya politik masyarakat Betawi Cengkareng pada Pilkada DKI Jakarta 2017?
3. Bagaimana bentuk Partisipasi masyarakat Betawi Cengkareng pada Pilkada DKI Jakarta 2017?
4. Sejauh mana faktor sistem religi memengaruhi partisipan masyarakat Betawi Cengkareng pada Pilkada DKI Jakarta 2017?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas terlihat sangat luas dan kompleksnya masalah yang ada. Pada penelitian ini, peneliti melakukan pembatasan terhadap permasalahan yang ada dan telah dirumuskan agar terarah dan terkonsentrasi dalam melakukan penelitian. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu “*Budaya Politik masyarakat Betawi Cengkareng pada Pilkada DKI Jakarta 2017*”

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: *“bagaimana Budaya Politik masyarakat Betawi Cengkareng pada Pilkada DKI Jakarta 2017?”*

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat yang bersifat teoritis dan bersifat praktis:

1. Kegunaan teoritis

Manfaat yang sifatnya memberikan sumbangan pemikiran yang berupa teori-teori dalam kaitannya dengan budaya politik dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, hal ini terkait dengan perkembangan yang sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kondisi dan perkembangan jaman, serta menambahkan kekhasan pengetahuan tentang kebudayaan masyarakat.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi penjelasan budaya politik khususnya bagi masyarakat Betawi Cengkareng. Lebih dari itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah DKI Jakarta agar senantiasa memberikan perhatian yang lebih terhadap kelestarian kebudayaan Betawi Cengkareng sehingga budaya politik dari masyarakat Betawi Cengkareng di dasarkan atas orientasi yang jelas dan rasional.

BAB II

ACUAN TEORETIK

A. Budaya Politik

Budaya politik merupakan bagian dari kehidupan politik, walaupun sementara pihak sering kali memandang budaya politik tak lebih hanya sebagai kondisi-kondisi yang mewarnai corak kehidupan masyarakat, tanpa memiliki hubungan baik dengan sistem politik maupun struktur politik. Menurut Elly Setiadi budaya politik merupakan sebuah pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, mekanisme penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat bangsa dalam kehidupan sehari-hari.⁵

Budaya politik juga bagian dari kebudayaan masyarakat yang mempunyai ciri-ciri lebih khas. Istilah budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. Austin R menelaah budaya politik merupakan seperangkat pandangan-pandangan tentang politik dan pemerintah yang dipegang secara bersama.⁶

Robert Dahl mengemukakan pendapatnya mengenai kebudayaan politik sebagai salah satu sistem yang menjelaskan pola-pola yang berbeda mengenai pertentangan politik. Ada beberapa unsur penting dalam budaya politik, yaitu

⁵ Elly M. Setiadi & Oesman Kolip. 2013. *Pengantar Sosiologi Politik*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta. Hlm 95.

⁶ *Ibid.* Hlm 98.

mengenai orientasi pemecahan permasalahan, apakah pragmatis atau rasionalistis; tentang orientasi terhadap aksi bersama, apakah mereka bersifat kerja sama atau tidak; orientasi terhadap sistem politik, apakah mereka setia atau tidak; orientasi terhadap orang lain, apakah mereka dipercaya atau tidak.⁷

Menurut Sidney Verba budaya politik adalah suatu sistem kepercayaan empirik, simbol-simbol ekspresif dan nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi dimana tindakan politik dilakukan. Sedangkan menurut Gabriel A. Almond budaya politik adalah dimensi psikologis dari sebuah sistem politik yang juga memiliki peranan penting berjalannya sebuah sistem politik

Almond dan Verba, yang dikutip oleh Nazaruddin Sjamsuddin,, mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu.⁸ Menurut kedua ahli tersebut, warga negara senantiasa mengidentifikasikan diri mereka masing-masing ke dalam simbol-simbol dan lembaga-lembaga kenegaraan berdasarkan orientasinya.

Lebih jauh Almond dan Verba melihat bahwa dalam pandangan tentang objek politik, terdapat tiga komponen dasar, yaitu:

1. Orientasi kognitif, pengetahuan tentang sistem politik dan kepercayaan pada sistem politik, peranan dan segala kewajibannya, serta input dan outputnya.

⁷ A. Rahman H.I. 2012. *Sistem Politik Indonesia*. Graha Ilmu. Jakarta. Hlm 268.

⁸ Alfian dan Nazaruddin S. *Profil Budaya Politik Indonesia*. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta 1991. Hlm 21

2. Orientasi afektif, perasaan terhadap sistem politik, peranannya dan penampilannya.
3. Orientasi evaluatif, keputusan dan pendapat tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.⁹

Berdasarkan beberapa konsep mengenai budaya politik diatas, maka bisa ditarik beberapa batasan kesimpulan. Pertama, budaya politik lebih mengedepankan aspek-aspek non-perilaku, melainkan budaya politik lebih menekankan pada perilaku nonaktual seperti orientasi, sikap, nilai, nilai dan kepercayaan. Kedua, orientasi dalam budaya politik adalah sistem politik, artinya setiap berbicara mengenai budaya politik tidak akan lepas dari yang namanya sistem politik, yakni setiap komponen yang terdiri dari komponen struktur dan fungsi dalam sistem politik. Ketiga, budaya politik merupakan penggambaran konseptual mengenai komponen-komponen dalam tataran masif atau juga menggambarkan masyarakat suatu negara atau wilayah, bukan perorangan atau perindividu.

B. Tipe-Tipe Budaya Politik

Berdasarkan sikap yang ditunjukkan budaya politik dibagi menjadi dua, yaitu budaya politik militan dan budaya politik toleransi.¹⁰

1. Budaya politik militan adalah budaya politik yangmana perbedaan tidak dipandang sebagai cara mencari jalan alternatif, akan tetapi

⁹ Komaruddin Sahid. *op.cit.* Hlm 81

¹⁰ Elly M. Setiadi & Oesman Kolip. *Op.Cit.* Hlm 104

dilihat sebagai cara yang jahat dan menantang. Bila terjadi krisis, maka pihak yang dicari adalah si kambing hitamnya.

2. Budaya politik toleransi adalah budaya politik yang menekankan pada masalah atau ide yang harus dinilai, mencari kesepakatan dan selalu memberikan hak yang sama kepada setiap orang. Sikap yang dibangun adalah netral dan kritis terhadap suatu gagasan atau ide, tetapi bukan saling curiga terhadap orang lain.

Berdasarkan sikap tradisi dan perubahan, maka budaya politik dibagi menjadi dua, yaitu budaya politik yang memiliki mental absolut dan budaya politik budaya politik yang mempunyai mental akomodatif.

1. Budaya politik yang mempunyai mental absolut memiliki nilai dan kepercayaan yang dianggap selalu sempurna dan tak dapat diganti. Cara yang diperlukan adalah intensifikasi dan kepercayaan, bukan sebuah kebaikan. Tipe budaya politik ini bisa tumbuh dalam tradisi, meski jarang bersikap kritis. Kesetiaan yang tumbuh dalam tradisi tidak memungkinkan pertumbuhan unsur baru.
2. Budaya politik yang memiliki sikap mental akomodatif adalah tipe budaya politik yang biasanya terbuka dan bersedia menerima tanggapan dan kritikan apa saja yang dianggap sebagai hal yang berguna. Tipe budaya ini bisa melepaskan ikatan tradisi, kritis terhadap diri sendiri dan bersedia menilai kembali tradisi berdasarkan perkembangan masa kini.

Sedangkan, berdasarkan orientasi politiknya, budaya politik dibagi menjadi beberapa kelompok. Melihat realitas Budaya politik yang berkembang di dalam masyarakat, Gabriel Almond dan Sidney Verba mengklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu:

1. Budaya Politik Parokial

Almond dan Sidney Verba menyatakan orientasi parokial menyatakan adanya harapan-harapan akan perubahan yang komperatif yang diinisiasikan oleh sistem politik. Kaum parokial tidak mengharapkan apapun dari sistem politik adalah spesialisasi peranan-peranan politik atau tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif yang rendah. Budaya politik parokial juga ditandai oleh tidak berkembangnya harapan-harapan akan perubahan yang akan datang dari sistem politik.¹¹

Pada kebudayaan politik parokial, anggota masyarakat cenderung tidak menaruh minat terhadap obyek-obyek politik yang luas, kecuali dalam batas tertentu, yaitu terhadap tempat dimana ia terikat secara sempit. Budaya politik parokial yang kurang lebih bersifat murni merupakan fenomena umum yang biasa ditemukan didalam masyarakat-masyarakat yang belum berkembang, dimana spesialisasi politik sangat minimal. Menurut Almond dan Verba secara relatif parokialisme murni itu berlangsung dalam sistem tradisional yang lebih sederhana dimana spealisasi politik berada pada jenjang yang minim.

¹¹ G. A. Almond dan S. Verba. *Budaya Politik, Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Bina Aksara. Jakarta. Hlm. 20

Parokialisme dalam sistem politik yang diferensiatif lebih bersifat afektif dan normatif ketimbang kognitif.¹²

2. Budaya Politik Subjek/Kaula

Orientasi kaum subyek/kaula terhadap obyek politik dapat dilihat dari pernyataannya, baik berupa kebanggaan, ungkapan sikap mendukung maupun sikap permusuhan terhadap sistem, terutama terhadap aspek output. Menurut Almond dan Verba budaya politik subyek/kaula memiliki frekuensi orientasi-orientasi yang tinggi terhadap sistem politiknya, namun perhatian dan intensitas orientasi mereka terhadap aspek masukan (input) dan partisipasinya dalam aspek keluaran (output) sangat rendah.¹³

Menurut Kantaprawira budaya politik Subjek/kaula adalah, dimana anggota masyarakat mempunyai minat, perhatian, dan mungkin pula kesadaran terhadap sistem sebagai keseluruhan, terutama terhadap segi output, sedangkan perhatiannya atas aspek input serta kesadarannya sebagai aktor politik, boleh dikatakan nol.¹⁴ Orientasi subyek dalam sistem politik yang telah mengembangkan perantara-perantara demokrasi lebih bersifat afektif dan normatif dari pada kognitif.

Orientasi subjek menganggap dirinya tidak berdaya memengaruhi atau mengubah sistem, dan oleh karena itu menyerah saja kepada segala kebijaksanaan dan keputusan para pemegang jabatan dalam

¹² *Ibid.* Hlm 21

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Rusadi Kantaprawira. 2006, *Sistem Politik Indonesia*. Sinar Baru Algensindo. Bandung. Hlm. 33

masyarakatnya. Segala keputusan yang diambil oleh pemeran politik dianggap sebagai sesuatu yang tak dapat diubah, dikoreksi apa lagi ditantang. Demokrasi sulit untuk berkembang dalam masyarakat dengan budaya politik subjek/kaula, karena masing-masing warga negaranya tidak aktif. Selain itu, mereka juga memiliki kompetensi politik yang rendah dan keberdayaan politik yang rendah. Sehingga, sangat sukar untuk mengharapkan partisipasi politik yang tinggi.

3. Budaya Politik Partisipan

Pada kaum partisipan dimana perhatian dan intensitas terhadap masukan maupun keluaran dari sistem politik sangat tinggi. Tipe budaya politik partisipasi dirinya atau orang lain dianggap sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik, ia memiliki kesadaran terhadap hak dan tanggung jawabnya. Menurut Almond dan Verba tipe budaya politik partisipan merupakan bentuk kultur dimana anggota-anggota masyarakat cenderung diorientasikan secara eksplisit terhadap aspek input maupun output dari sistem itu.¹⁵

Budaya politik partisipan masyarakat merealisasi dan memergunakan hak-hak politiknya, dengan demikian masyarakat dalam budaya politik partisipan tidak begitu saja menerima keputusan politik. Kemudian masyarakat ini akan menyadari hak dan kewajibannya serta memergunakan secara aktif. Mereka akan dapat menilai dengan penuh

¹⁵ G. A. Almond dan S. Verba, *op.cit.* hlm. 22

kesadaran baik terhadap sistem sebagai totalitas, input dan output maupun terhadap posisi atau peran dirinya sendiri.

C. Budaya Politik di Indonesia

Indonesia merupakan Negara yang majemuk. Banyak budaya daerah yang hadir dalam system budaya di negeri ini. Telah menimbulkan sub-subbudaya politik di Indonesia, yang semuanya memiliki jarak yang berbeda dan juga struktur politik yang berbeda pula. Menurut Hebert Feith, yang dikutip oleh Nazarudin Syamsudin, Indonesia mempunyai budaya politik yang dominan, yaitu aristokrasi Jawa dan wiraswasta Islam.¹⁶

Pendapat lain dikemukakan oleh Clifford Geertz, yang mengelompokan masyarakat Indonesia atas subbudaya politik, yaitu santri abangan dan priyai. Sementara Clifford Geertz secara menyeluruh mengelompokna masyarakat Indonesia ke dalam tiga subbudaya politik: petani pedalaman Jawa dan Bali, masyarakat Islam pantai, dan masyarakat pegunungan, yang disebut dengan sosio cultural.¹⁷

Sehubungan dengan adanya proses pembentukan budaya politik nasional, terdapat beberapa unsur yang berpengaruh, yaitu:

1. Unsure subbudaya politik yang berbentuk budaya politik asal. Budaya politik asal adalah budaya politik yang dimiliki seseorang atau suatu masyarakat, yaitu budaya politik yang telah tumbuh dan berkembang dalam dirinya sesuai dengan latar belakang lingkungannya. Apa yang

¹⁶ Alfian dan Nazaruddin S. *op.cit.* hlm. 30

¹⁷ *ibid*

dimaksud dengan latar belakang adalah ikatan yang tumbuh akibat adanya nilai primordialisme atau kesetiaan primordial

2. Unsur yang kedua adalah aneka rupa subbudaya politik yang berasal dari luar lingkungan tempat budaya politik asal itu berada. Dalam interaksi antara budaya politik asal dengan subbudaya politik luar ini, dapat dikatakan telah berlangsung suatu proses pemerayaan pada berbagai subbudaya politik itu, karena masing-masing subbudaya politik luar ini, dapat dikatakan telah berlangsung suatu proses pemerayaan pada berbagai subbudaya politik itu, karena masing-masing subbudaya politik tersebut dapat saling memengaruhi.
3. Budaya politik nasional. Peran budaya politik nasional tergantung pada tahapan yang telah ditentukan dalam proses pembentukannya dan pertumbuhan budaya politik nasional dapat dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu:
 - Budaya politik nasional yang sedang berada dalam proses pembentukannya.
 - Budaya politik nasional yang tengah mengalami proses pematangan. Dalam tahap ini, budaya politik nasional pada dasarnya sudah ada tapi belum matang.
 - Budaya politik yang sudah mapan, yaitu budaya politik yang telah diakui keberadaannya secara nasional.¹⁸

¹⁸ *Ibid.* Hlm 31-32

Jadi, dapat dikatakan bahwa proses pematangan budaya politik di Indonesia pada dasarnya melibatkan suatu tahap penyesarian antara sub-subbudaya politik dengan struktur politik nasional, dimana subbudaya politik lebih dominan daripada struktur politik nasional karena subbudaya politik merupakan orientasi sudah matang, dalam arti sudah terjadi kesesuaian antara aspek-aspek budaya daerah dengan struktur politiknya. Subbudaya politik yang sudah kuat inilah yang hendak diserasikan dengan struktur politik nasional yang baru tumbuh dan dikembangkan sejak Indonesia merdeka.

Perkembangan-perkembangan pada tingkat subbudaya politik menunjukkan bahwa pada umumnya "budaya politik daerah" telah menerima pengaruh besar dari dua faktor dominan yang ada dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Kedua faktor tersebut adalah sistem kultural (adat istiadat) dan sistem kepercayaan (agama). Dikebanyakan daerah, adat istiadat muncul dalam berbagai wajah dan rupa. Contohnya adalah tradisi suatu masyarakat di daerah tertentu. Lingkungan daerah tersebut pastinya melahirkan kompleksitas suku budaya daerah.

Pertemuan antara subbudaya adat dan Agama telah berlangsung sejak lama bahkan sudah berlangsung selama ratusan tahun. Sehingga tidak saja mendarah daging, melainkan sudah mengaburkan batasan-batasan yang ada. Pastinya pertemuan sedemikian rupa tersebut telah mematangkan subkebudayaan politik yang ada Sibayak daerah di Indonesia.

Tradisi yang terdapat pada masyarakat di Jawa, misalnya, merupakan salah satu bukti kuat mengenai telah terjadinya perpaduan antara aspek-aspek adat dan agama. Di Sumatera Barat, keturunan yang didasari oleh garis keturunan ibu (matrilineal) memperlihatkan betapa kuatnya dominasi adat dalam kehidupan di Minangkabau.

Dengan demikian pada saat ini kita dapat menyaksikan bahwa subbudaya politik yang terdapat di berbagai daerah telah dimatangkan oleh hubungan antara adat dan agama yang sifat keduanya saling menunjang. Dapat dipastikan pula apa yang terjadi dalam proses pematangan itu tidak hanya berkaitan dengan berbagai subbudaya politik tersebut, tetapi juga dengan berlangsungnya interaksi antara komponen adat dan agama itu sendiri. Adat dan agama tidak hanya berinteraksi pada pihak ketiga, melainkan antar keduanya saling memengaruhi.

Kepolitikan selama ini memperlihatkan bagaimana persaingan dan peraturan antar subkebudayaan politik, di satu pihak, serta antara subkebudayaan politik dan budaya politik. Dilain pihak, telah mewarisi proses pembentukan dan pematangan budaya politik sesungguhnya persaingan antarsubkebudayaan politik merupakan hal yang wajar saja, sebab dalam masyarakat manapun hal semacam itu bisa dijumpai dimana saja. Menjadi persoalan jika persaingan tersebut menimbulkan situasi pembenturan subbudaya politik satu dengan lainnya atau tidak?¹⁹

¹⁹ *Ibid*, Hlm 41

D. Partisipasi Politik

Dalam analisis mengenai politik modern partisipasi merupakan suatu masalah yang cukup penting, terlebih di negara berkembang. Pada awalnya proses partisipasi politik hanya memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, akan tetapi sesuai perjalanan perkembangan demokrasi banyak bermunculan kelompok-kelompok masyarakat yang ingin ikut serta dalam proses pengambilan keputusan suatu kebijakan.

Menurut Miriam Budiardjo, partisipasi merupakan kegiatan seorang atau kelompok tertentu yang ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan melakukan pemilihan umum dan memengaruhi kebijakan pemerintah.²⁰

Partisipasi sebagai kegiatan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1 Partisipasi Aktif merupakan kegiatan mengajukan usulan mengenai suatu kebijakan umum, memberikan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan umum yang sedang disusun oleh pemerintah. Partisipasi aktif cenderung berorientasi pada input dan output dari sistem politik.
- 2 Partisipasi Pasif adalah kegiatan yang hanya menaati pemerintah, menerima dan melaksanakan setiap keputusan dari kebijakan umum yang dibuat oleh pemerintah. Partisipasi pasif cenderung hanya berorientasi pada output sistem politik semata.

²⁰ Miriam Budiardjo. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia. Jakarta. Hlm 367

Menurut Harbert McClosky, yang dikutip oleh Miriam Budiardjo, partisipasi adalah kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, secara langsung dan tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.²¹

Dalam hubungan dengan negara-negara baru Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, yang dikutip oleh Miriam Budiardjo, memberikan tafsiran yang lebih luas dengan memasukan secara eksplisit tindakan ilegal dan kekerasan. Menurut mereka partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.²²

Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses perpolitikan terdorong oleh keyakinan bahwa dengan kegiatan partisipasi ini kepentingan-kepentingan mereka akan tersalurkan hingga terserap oleh pemerintah atau tidaknya mereka sedikit lebih diperhatikan oleh pemerintah. Partisipasi sangat erat kaitannya dengan kesadaran politik suatu masyarakat. Masyarakat semakin sadar bahwa dirinya tidak harus diperintah oleh segelintir orang atau kelompok.

Pada umumnya tingkat partisipasi yang tinggi akan memperlihatkan demokrasi suatu masyarakat baik juga. Dalam hal ini, angka partisipasi menunjukkan bahwa masyarakat mengetahui betul masalah politik yang sedang

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*. Hlm 368

terjadi dan rezim tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran yang lebih baik. Sebaliknya, partisipasi yang rendah ditunjukkan sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat diartikan sebagai masyarakat kurang menaruh perhatiannya atau tidak memahammi permasalahan politik yang sedang terjadi.

Faktanya, kegiatan sukarela saja tidak mampu, karena sangat sulit membedakan antara kegiatan yang sukarela dan kegiatan yang “sukarela” karena kepentingan terselubung. Oleh karena itu, Huntington dan Nelson, dikutip oleh Miriam Budiarjo, membedakan partisipasi menjadi dua jenis, yaitu partisipasi otonom (*autonomous participation*) atau *Self Motion* dan partisipasi yang dimobilisasi atau dikerahkan oleh pihak lain (*mobilized participation*).²³

Banyak pihak yang berpendapat kalau partisipasi bersifat positif, namun ada juga partisipasi yang bersifat negatif atau destruktif, misalnya demonstrasi, teror, pembunuhan politik, makar dan lain-lain. Selain itu, bentuk berlainan dari partisipasi politik adalah apatis. Memang dalam sebuah partisipasi, sikap apatis ialah sikap yang kurang baik yang mencerminkan seorang atau masyarakat tidak turut andil dalam kegiatan politik. Namun bagi beberapa tokoh sikap apatis bukanlah masalah yang besar. Malah, sikap apatis bisa menjadi positif karena memberikan fleksibilitas terhadap sistem politik, dibanding kelompok dengan tingkat partisipasi yang terlalu berlebihan dan terlalu aktif sehingga bermuara kepada suatu pertikaian, fragmentasi politik dan instabilitas sebagai manifestasi ketidakpuasan.

²³ *Ibid.* Hlm 370

E. Bentuk-Bentuk Partisipasi

Pertisipasi politik dapat dari beberapa sisi. Sebagai suatu kegiatan, Ramlan Subakti membedakannya menjadi pertisipasi aktif dan partisipasi pasif. Pertisipasi aktif berorientasikan pada masukan (input) dan keluaran (output) sistem politik, seperti mengusulkan sebuah kebijakan, memberikan kritik dan saran, dan lain-lain. Sedangkan partisipasi pasif hanya pada output sistem politik, seperti ikut memilih dalam pemilu, membayar pajak, mentaati peraturan pemerintah.

Sementara, Milbrath dan Goel yang dikutip oleh Sudiiyono Sastroatmodjo membedakan partisipasi politik menjadi empat bagian yang diantaranya :

1. Apatis, yaitu orang yang menarik diri dari proses politik.
2. Spektator, yaitu yang berada pada kategori pasif yang setidaknya tidaknya pernah ikut dalam pemilu.
3. Gladiator, yaitu orang-orang yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni sebagai komunikator dengan tugas khusus mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai, dan pekerja kampanye, serta aktivis masyarakat.

4. Pengkritik, yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional seperti mengadakan demonstrasi, memberikan ancaman, mogok kerja dan sebagainya.²⁴

Selain itu Goel dan Olsen memandang partisipasi sebagai dimensi utama kehidupan stratifikasi sosial. Mereka membagi partisipasi politik menjadi enam lapisan yang diantaranya :

1. Pemimpin politik, aktivis politik, komunikator, yaitu orang-orang yang menerima dan menyampaikan ide-ide, sikap, dan informasi politik pada orang lain.
2. Warga negara marginal yaitu orang yang sedikit melakukan kontak dengan sistem politik.
3. Orang-orang yang terisolasi yaitu orang yang jarang melakukan partisipasi politik.²⁵

Berdasarkan sifatnya dapat dibedakan menjadi partisipasi yang bersifat sukarela (otonom) dan atas desakan orang lain (dimobilisasi). Bentuk bentuk partisipasi politik berdasarkan pelakunya, dibedakan menjadi partisipasi individual dan partisipasi kolektif. Partisipasi kolektif dibedakan menjadi partisipasi kolektif yang konvensional dan non-konvensional. Bentuk partisipasi konvensional adalah seperti pemilu, diskusi politik, kampanye, ikut kelompok kepentingan, lobbying kontak dengan pejabat, dan lain-lain. Partisipasi politik non konvensional adalah seperti

²⁴ Sudijono Sastroatmodjo. 1995, *dasar-dasar ilmu politik*. UNNES Semarang. Semarang. Hlm. 74-75

²⁵ *Ibid. hlm 174*

mengajukan petisi, demonstrasi, tindakan kekerasan, konfrontasi, pembakaran, gerilya revolusi, kudeta dan sebagainya.

F. Pemilihan Umum

Demokrasi sebagai aspek penting berkaitan dengan pemerintahan dengan hirarkhi kekuasaan yang terdapat dalam suatu sistem politik negara. Artinya, akan terdapat sistem politik nasional yang didalamnya terdapat sub sistem politik daerah dalam bingkai sistem negara yang dianutnya. Pemilihan demokrasi lokal ini bukan berarti terdapat determinasi wilayah pemberlakuan demokrasi atau bahkan terdapat perbedaan demokrasi dari induknya. Dalam tulisan ini demokrasi lokal

ditujukan sebagai bagian utuh dari demokrasi di Indonesia. Pemilihan langsung merupakan wujud nyata asas responsibilitas dan akuntabilitas karena Pemilihan langsung akan memperkuat legitimasi seorang kepala daerah karena ia dipilih langsung oleh rakyat.²⁶

Dengan Pemilihan langsung maka akan memperkuat legitimasi seorang kepala daerah karena ia dipilih langsung oleh rakyatnya. Elit politik atau partai politik tidak bisa lagi menjatuhkan seenaknya seorang kepala daerah (kecuali ia melakukan tindakan kriminal dan mengkhianati negara atau makar) karena ia merupakan pilihan rakyat, suara rakyat adalah pilihan rakyat dan suara rakyat adalah suara Tuhan (*vox populi vox dey*). Oleh karena itu seorang presiden yang dipilih secara langsung memiliki legitimasi yang tinggi.²⁷

²⁶ Lili Romli. 2007. *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. hlm. 320

²⁷ *Ibid*

Pemilu eksekutif daerah ini berada dalam koridor demokrasi lokal dalam lingkup asas pemerintahan yang desentralisasi dan didasarkan pada rel kebijakan publik UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemilihan Kepala daerah langsung merupakan fenomena baru dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Sepanjang sejarah pemerintahan, baru sekarang ini akan dilaksanakan.

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004, kita dapat membahas adanya perkembangan demokrasi yang semakin dekat dengan konstituennya yaitu masyarakatnya. Secara umum ini merupakan kemajuan yang sangat berarti bagi hubungan pemerintahan daerah dengan rakyatnya dalam hal penggunaan hak politiknya.

Lahirnya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dilatarbelakangi oleh berbagai ketidaksempurnaan dari peraturan perundangan yang lebih dahulu dikeluarkan, yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang pembagian keuangan antara pusat dan daerah. Kekurangan yang terdapat pada undang-undang yang terdahulu adalah perlunya mengatur sistem pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah secara langsung, sebab diyakini pemilihan langsung merupakan cara yang paling demokratis untuk benar-benar menjamin terselenggaranya aspirasi rakyat. Dengan diadakannya metode pemilihan langsung Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah oleh rakyat kemungkinan kolusi antar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat di eliminasi.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung diatur oleh undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pada pasal 56 ayat 1 dijelaskan bahwa:

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.²⁸

Penyelenggaraan Pemilukada langsung menjadi tugas dari Komisi Pemilihan Umum Daerah yang bersangkutan. Sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah maka DPRD harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Selain memberitahukan kepada Kepala Daerah DPRD juga memberitahukan kepada KPUD perihal berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah minimal lima bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Setelah pemberitahuan dari DPRD maka KPUD berkewajiban untuk menetapkan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan telah disampaikan kepada DPRD dan Kepala Daerah selambat-lambatnya 14 hari sejak pemberitahuan dari DPRD, membentuk Panitia Pengawas, PPK, PPS, dan KPPS yang mana paling lambat 21 hari sejak pemberitahuan dari DPRD.

Berdasarkan atas pemberitahuan dari DPRD maka Kepala Daerah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat 30 hari setelah pemberitahuan DPRD.²⁹

Setiap pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang akan bertarung dalam Pemilukada harus diajukan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik. Partai politik yang akan mengajukan calon Kepala Daerah tersebut harus memperoleh minimal 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi yang ada di DPRD daerah yang bersangkutan atau 15% (lima belas persen) dari jumlah akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD daerah tersebut.³⁰ Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah yang sedang menjabat dan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik menjadi calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah maka wajib mengundurkan diri dari jabatannya sejak saat pendaftaran oleh partai politik atau gabungan partai politik seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

a Tahapan Pemilukada

Berdasarkan UU nomor 32 Tahun 2004 memenuhi syarat disebut sebagai Pemilukada langsung karena dilaksanakan dengan kegiatan yang melibatkan rakyat sebagai pemilih, memberikan kesempatan kepada

²⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah pasal 2 ayat 1-4 dan pasal 3 ayat 1-3

³⁰ UU nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan kepala daerah pasal 59 ayat 1 dan 2

masyarakat melalui partai politik untuk menjadi calon, menjadi penyelenggara, dan mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan.³¹

Pelaksanaan Pemilukada langsung dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu masa persiapan dan tahap pelaksanaan, sebagaimana dikatakan dalam pasal 65 ayat 1.³² Selanjutnya pada ayat 2 pasal yang sama disebutkan bahwa kegiatan – kegiatan yang tercakup dalam masa persiapan adalah :

- Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan.
- Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah
- Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah
- Pembentukan Panitia pengawas, PPK, PPS dan KPPS
- Pembentukan dan pendaftaran pemantau.

Pada masa persiapan keterlibatan rakyat sangat menonjol dalam pembentukan Panitia Pengawas (Panwas), PPK, PPS, dan KPPS serta memiliki akses untuk memantau melalui mekanisme uji publik melalui lembaga – lembaga tersebut. Selajutnya tahap pelaksanaan terdiri dari 6 kegiatan sesuai pasal 65 ayat 3,³³ yaitu :

1. Penetapan daftar pemilih

³¹ UU nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

³² Prihatmoko. 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Pustaka Pelajar.Jogjakarta. hlm 210

³³ *Ibid*

2. Pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah / wakil kepala daerah.
3. Kampanye
4. Pemungutan Suara
5. Penghitungan Suara
6. Penetapan pasangan calon kepala daerah / wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan.

Pemilukada meliputi pemilihan gubernur, pemilihan walikota dan pemilihan bupati. Pilkada menurut UU no 32/2004 tentang pemerintahan daerah adalah :

“bahwa pelaksanaan pilkada langsung pada hakikatnya tidak hanya untuk tujuan mengoptimalkan demokratisasi di daerah, melainkan merupakan perwujudan dari prinsip otonomi daerah seluas-luasnya³⁴

³⁴ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, 2007.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk menggali informasi sedalam-dalamnya mengenai budaya politik masyarakat Betawi Cengkareng dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

B. Metode Penelitian

Sesuai dengan tujuannya, penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai budaya politik masyarakat Betawi Cengkareng dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan mengamati orientasi politiknya. Dalam penyusunan penelitian ini penulis mengharuskan diri untuk berinteraksi dengan masyarakat Betawi Cengkareng. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kasuistik.

Dasar penelitian ini adalah bersifat kasus dimana penelitian diarahkan untuk menggambarkan fakta dengan kejadian yang tepat. Penelitian dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Alasan menggunakan penelitian ini adalah untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta tentang orientasi politik Masyarakat Betawi Cengkareng. Namun demikian, dalam perkembangannya selain menjelaskan tentang situasi atau kejadian yang sudah

berlangsung sebuah penelitian deskriptif juga dirancang untuk membuat sebuah komparasi dari kasus yang ada.

C. Penentuan “*Setting*”

Lokasi penelitian di Kecamatan Cengkareng, Jakarta dengan objek penelitian tentang intensitas budaya politik dalam pemilihan langsung kepala DKI Jakarta 2017. Alasan memilih subkebudayaan sistem kepercayaan adalah karena faktor tersebut memiliki pengaruh besar dalam Pilkada DKI Jakarta.

D. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan alat re-checking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Proses pengumpulan data dengan wawancara mendalam peneliti membaginya menjadi dua tahap, yakni :

1. Pertama peneliti membuat pedoman wawancara yang disusun berdasarkan dimensi kebermaknaan hidup sesuai dengan permasalahan yang dihadapi subjek. Pedoman wawancara ini berisi pertanyaan-pertanyaan mendasar yang nantinya akan berkembang dalam wawancara. Pedoman wawancara yang telah disusun, ditunjukkan kepada yang lebih ahli dalam hal ini adalah pembimbing penelitian untuk mendapat masukan mengenai isi pedoman wawancara. Setelah mendapat masukan dan koreksi dari pembimbing, peneliti membuat perbaikan terhadap pedoman wawancara dan mempersiapkan diri untuk melakukan wawancara.
2. Tahap persiapan selanjutnya adalah peneliti membuat pedoman observasi yang disusun berdasarkan hasil observasi terhadap perilaku subjek selama wawancara dan observasi terhadap lingkungan atau setting wawancara, serta pengaruhnya terhadap perilaku subjek dan pencatatan langsung yang dilakukan pada saat peneliti melakukan observasi. Namun apabila tidak memungkinkan maka peneliti sesegera mungkin mencatatnya setelah wawancara selesai.

3. Peneliti selanjutnya mencari subjek yang sesuai dengan karakteristik subjek penelitian. Sebelum wawancara dilaksanakan peneliti bertanya kepada subjek tentang kesiapannya untuk diwawancarai. Setelah subjek bersedia untuk diwawancarai, peneliti membuat kesepakatan dengan subjek tersebut mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara. Peneliti membuat kesepakatan dengan subjek mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara berdasarkan pedoman yang dibuat. Setelah wawancara dilakukan, peneliti memindahkan hasil rekaman berdasarkan wawancara dalam bentuk tertulis. Selanjutnya peneliti melakukan analisis data dan interpretasi data sesuai dengan langkah-langkah yang dijabarkan pada bagian metode analisis data di akhir bab ini. setelah itu, peneliti membuat dinamika psikologis dan kesimpulan yang dilakukan, peneliti memberikan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) agar wawancara tetap berada pada fokus penelitian, meski tidak menutup kemungkinan terdapat pertanyaan-pertanyaan berlanjut. Informan yang dipilih adalah informan yang

benar paham dan mengetahui permasalahan yang dimaksud. Komponen Informan yang akan penulis wawancarai untuk pengumpulan data ini adalah:

1. Pengurus besar Betawi Cengkareng
2. Masyarakat Betawi Cengkareng
3. Akademisi

Pemilihan informan dapat berkembang dan berubah sesuai dengan kebutuhan penelitian dalam memperoleh data yang akurat. Penelitian ini berakhir ketika peneliti sudah merasa data yang didapat sudah cukup untuk untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

b. Dokumen/Arsip

Metode atau teknik dokumenter adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia. Dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian. Dokumen dan arsip mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan fokus penelitian merupakan salah satu sumber data yang paling penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen tertulis, gambar/foto, atau flim audio-visual, data statistik, laporan penelitian sebelumnya

E. Teknik Kalibrasi Keabsahan Data

Dalam penelitian yang bersifat kualitatif, keabsahan data yang harus teruji adalah data yang dikumpulkan. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian serta tercapainya tujuan yang diinginkan, oleh karena itu penelitian ini perlu adanya kalibrasi keabsahan data, yaitu dengan:

1 Perpanjang pengamatan

Kegiatan perpanjang pengamatan ini dilakukan untuk memeriksa ulang temuan yang sudah ada. Hal ini berarti temuan si peneliti dicek kembali apakah terjadi bias atau salah persepsi dengan cara menambah jam/waktu penelitian. Dalam perpanjang pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian, harus di fokuskan pada pengujian terhadap data yang diperoleh, apakah data tersebut setelah dicek kembali benar atau tidak dan berubah atau tidak.

Pengujian terhadap data yang diperoleh ini dilakukan kepada Keyinforman, yaitu orang-orang yang lebih memahami mengenai fokus masalah yang telah diteliti. Orang-orang tersebut ialah anggota organisasi Masyarakat *Beceng*.

2 Triangulasi Data

Triangulasi data adalah menggabungkan beberapa data yang telah didapatkan. Prinsip ini adalah cek dan ricek, teknis ini banyak digunakan karena dianggap sebagai teknik yang dapat diandalkan. Pengecekan dapat dilakukan dengan pengecekan ketiga sumber, yaitu

Kepala Kecamatan Cengkareng, Ketua Pengurus Betawi Cengkareng, dan Masyarakat Betawi Cengkareng.

3 Kecukupan Referensial

Kecukupan referensial ini adalah upaya dalam mengumpulkan data menggunakan alat seperti catatan *audio*, *visual*, serta *audio visual*.

Hal ini dilakukan agar ada bukti lain selain catatan yang telah dibuat.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan mencari dan menyusun data secara sistematis atau berurutan, seperti wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasi data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Kegiatan dalam menganalisis data dalam penelitian ini, yaitu:

- 1 Kegiatan reduksi data, pada tahap ini peneliti memilih hal yang pokok dari data yang didapat dari lapangan. Kegiatan ini juga merangkum dan memokuskan pada hal-hal yang penting saja. Proses reduksi ini dilakukan dengan cara bertahap. Memilah-milah data yang dianggap penting dengan berfokuskan pada budaya politik masyarakat Betawi Cengkareng.

- 2 Penyajian data, setelah mereduksi data langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Di dalam kegiatan ini, penulis menyusun kembali data berdasarkan klasifikasi dan masing-masing topik dipisahkan, kemudian topik yang sama disimpan menjadi satu folder yang sama, masing-masing tempat diberikan tanda agar tidak terjadi kekeliruan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat atau dalam bentuk bagan.
- 3 Setelah data dianggap cukup dan mempunyai nilai kesesuaian, maka kegiatan selanjutnya adalah menyusun sebuah laporan hingga membuat kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian

a. Keadaan Geografis

Kecamatan Cengkareng merupakan salah satu kecamatan diwilayah Kota Jakarta Barat yang terdiri atas 6 Kelurahan, 84 RW (Rukun Warga) dan 1.002 RT (Rukun Tetangga). Berdasarkan mengenai surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 Tahun 2007, luas wilayah Kecamatan Cengkareng adalah 26,54 km² dengan masing-masing luas Kelurahan Duri Kosambi 5,91 KM², kelurahan Rawa Buaya 4,17 KM², Kelurahan Kedaung Kali Angke 2,81 KM², Kelurahan Kapuk 5,63 KM², Kelurahan Cengkareng Timur 4,51 KM², Kelurahan Cengkareng Barat 3,61 KM². Secara geografis letak kecamatan Cengkareng berada pada 106⁰22'42'' BT – 106⁰58'18'' BT dan 5⁰19'12'' LS – 6⁰23'54'' LS. Tinggi permukaan Kecamatan Cengkareng dari Permukaan air laut sekitar 7 MDPL (Meter Diatas Permukaan Laut).³⁵

Kecamatan Cengkareng mempunyai batas wilayah disebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Kapuk Kamal, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Disebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pangeran Tubagus Angke, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan. Disebelah Selatan berbatasan dengan kali

³⁵ Dokumen Kantor Kecamatan Cengkareng 2017

Pesanggrahan Kelurahan Kembangan, Kecamatan Kembangan. Disebelah Barat Berbatasan dengan Jalan Ring Road Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres.

Tabel 1: Luas Wilayah, Jumlah RT, RW dan Kepala Keluarga menurut Kelurahan tahun 2014.

No.	Kelurahan	Luas Wilayah (KM ²)	Jumlah/Total		
			RT	RW	Kepala Keluarga
1	Duri Kosambi	5,91	165	15	23.561
2	Rawa Buaya	4,07	140	12	21.635
3	Kedaung Kali Angke	2,81	82	8	11.915
4	Kapuk	5,63	222	16	46.009
5	Cengkareng Timur	4,51	223	17	26.829
6	Cengkareng Barat	3,61	181	17	21.642
Jumlah		26,54	1.013	84	151.591

Sumber Arsip Kantor Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Barat tahun 2017

b. Pemerintahan

Kondisi Pemerintahan di Kecamatan Cengkareng tak jauh berbeda dengan kondisi di Kecamatan pada Umumnya. Secara struktural Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang dibantu seorang Wakil Camat, dan Sekretaris Camat yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memenuhi persyaratan administrasi. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang dibantu oleh Wakil Lurah, dan sekretariat Lurah yang diangkat dari PNS yang telah memenuhi persyaratan. Untuk membantu Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dibentuklah sebuah lembaga musyawarah Kelurahan. Anggota lembaga musyawarah Kelurahan dipilih secara demokratis pada tingkat rukun warga

dan selanjutnya ditetapkan oleh Walikota melalui Camat. Berikut beberapa tabel mengenai Kondisi Pemerintahan di Kecamatan Cengkareng.

Tabel 2: Jumlah PNS yang Bekerja di Kantor Kecamatan dan Kelurahan menurut Jenis Kelamin tahun 2014

No	Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Duri Kosambi	12	5	17
2	Rawa Buaya	4	15	19
3	Kedaung Kali Angke	10	6	16
4	Kapuk	13	6	19
5	Cengkareng Timur	13	3	16
6	Cengkareng Barat	10	6	16
7	Kecamatan Cengkareng	11	7	18
Jumlah		73	48	121

Sumber Arsip Kantor Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Barat tahun 2017

Tabel 3: Target dan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Cengkareng Tahun 2014

No	Kelurahan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Duri Kosambi	6.703.097.236	6.287.229.165	93,80
2	Rawa Buaya	5.787.398.205	5.515.005.627	95,29
3	Kedaung Kali Angke	4.051.277.688	4.007.843.472	98,93
4	Kapuk	9.375.194.184	9.303.792.024	99,24
5	Cengkareng Timur	7.914.144.082	7.542.994.448	95,31
6	Cengkareng Barat	6.426.410.082	5.890.593.705	91,66
7	Kecamatan Cengkareng	13.666.114.323	10.849.853.055	79,39
Jumlah		53.923.635.750	49.397.311.496	91,61

Sumber Arsip Kantor Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Barat tahun 2017

c. Kependudukan dan ketenagakerjaan

Pertumbuhan jumlah penduduk di Kecamatan Cengkareng dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan yang lumayan pesat hal ini bisa dilihat dari beberapa tabel dibawah. Hal berbeda juga menunjukkan Jumlah tenaga Kerja yang sedikit meningkat. Jika kedua hal tersebut tidak dibarengi dengan pembukaan lapangan pekerjaan yang banyak, maka bisa dipastikan kondisi kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Cengkareng akan menurun. Berikut beberapa tabel yang menggambarkan Kependudukan dan Ketenagakerjaan di Kecamatan Cengkareng.

Tabel 4: Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Rasio Jenis Kelamin di Kecamatan Cengkareng tahun 2014

No.	Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Duri Kosambi	41.272	39.926	81.198	103,37
2	Rawa Buaya	35.971	33.841	69.812	106,29
3	Kedaung Kali Angke	19.138	16.842	35.980	113,63
4	Kapuk	77.824	72.569	150.393	107,24
5	Cengkareng Timur	44.617	42.695	87.312	104,50
6	Cengkareng Barat	34.975	36.180	71.155	96,67
Jumlah		253.797	242.053	495.850	104,85

Sumber Arsip Kantor Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Barat tahun 2017

Tabel 5: Jumlah Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan yang ditamatkan di Kecamatan Cengkareng tahun 2014.

No.	Kelurahan	SD	SLTP	SLTA	Akademi/PT
1	Duri Kosambi	-	6	273	204
2	Rawa Buaya	-	5	181	156
3	Kedaung Kali Angke	-	7	433	138
4	Kapuk	-	16	1.021	1.276
5	Cengkareng Timur	-	2	512	2.036
6	Cengkareng Barat	-	9	311	2.891
Jumlah		-	45	2.731	6.701

Sumber Arsip Kantor Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Barat tahun 2017

d. Kesejahteraan Sosial dan Perekonomian

Secara umum perkembangan kesejahteraan sosial dan perekonomian di Kecamatan Cengkareng cukup baik. Pada dekade terakhir banyak sekali pembangunan sarana dan prasarana, seperti pembangunan jalan Tol Outer Ring Road, Perbaikan jalan Daan Mogot, Revitalisasi Kali Cisadane dengan pambangunan tanggul, dan lain-lain. Diaspek pendidikan jumlah gedung sekolah meningkat. Tercatat pada tahun 2014 jumlah Sekolah Dasar di Kecamatan Cengkareng 134 SD meningkat menjadi 142 SD ditahun 2015, begitupun untuk jumlah SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi/Akademi.

B. Sumber Informasi

Selama penelitian dilakukan, peneliti mencari data atau sumber informasi melalui wawancara, dan observasi. Wawancara merupakan proese pengambilan keterangan kepada informan dan *key informan*. Sebelum

melakukan wawancara peneliti membuat pedoman wawancara (*interview guide*) agar wawancara berada dalam garis fokus penelitian, meski tidak menutup kemungkinan terdapat pertanyaan-pertanyaan yang kemudian bisa saja muncul akibat pertanyaan sebelumnya. Informan yang di pilih dalam wawancara tersebut sebanyak 10 orang, sebagai berikut :

Tabel 6: Informan

Nama informan	Pekerjaan	Pendidikan
Akmal Permatasari	Wartawan	S1
Dendy Indrawan	Wirusaha	SMA
Mohammad Bagus I	Pegawai Swasta	S2
Rara Rizkiana Dewi	Mahasiswa	SMA
Giza Pratiwi	Pelajar	SMP
Indah P	Ibu Rumah Tangga	D4
Shafira D	Pelajar	SMP
Desih Yanah	Guru	S1
H. Sadelih	Guru Ngaji	SD
Desmoon	Mahasiswa	SMA

Sedangkan untuk *key informan* terdiri dari 2 orang yaitu Achmad Sadelih dan Achmad Rifai. Selanjutnya untuk observasi peneliti melakukan pengambilan data pada saat proses Pemungutan Suara pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

C. Temuan Penelitian

a. Orientasi Politik Masyarakat Betawi Cengkareng

Orientasi Politik Masyarakat Betawi Cengkareng dilihat dari tiga aspek, yaitu Kognitif, Afektif, dan Evaluatif. Kognitif adalah kemampuan masyarakat dalam mencari informasi terkait sistem politik yang ada, dalam kasus Pilkada ini informasi yang dimuat adalah pengetahuan tentang Pemilihan yang ada, seperti Siapa pasangan calon, Visi dan misi, hingga program kerja. Aspek Afektif meliputi perasaan masyarakat Betawi Cengkareng terhadap Pasangan Calon yang ada. Terakhir aspek Evaluatif merupakan tindak lanjut serta harapan yang diinginkan masyarakat Betawi Cengkareng terhadap Pasangan Calon yang terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2017.

Temuan orientasi politik pada aspek kognitif adalah 10 wawancara yang dipilih secara acak dari latar belakang keluarga yang berbeda di Wilayah Cengkareng. Hasil temuan tersebut menunjukkan 9 dari 10 informan sudah bisa menjawab pengetahuan politik, contohnya Desih Yanah, Menurut tenaga pendidik tersebut sebagai warganegara pasti mempunyai hak dan kewajiban politik. Lanjut, Desih menuturkan program kerja dari Pasangan Calon yang dipilihnya, yaitu nomor urut 3, yaitu tentang program 'Oke-Oce', rumah DP 0%. Menurut Desih Program dari Pasangan Calon nomor urut 3 sudah sangat baik karena bisa membangun hunian bagi masyarakat.

Hal berbeda ditemukan pada hasil wawancara dengan H. Sadelih, Seorang Guru Ngaji, yang tidak memahami hak dan kewajiban. Pada saat

wawancara hanya bisa menerka jawaban mengenai hak dan kewajiban warganegara dalam bidang politik. Saat ditanya mengenai strategi Pasangan Calon, H. Sadelih menjawab hanya bisa memberi janji-janji seperti Pemilihan sebelumnya.

Hasil temuan dibidang afektif menunjukkan semua informan bisa menggambarkan kondisi perasaan mereka terhadap Pasangan Calon DKI Jakarta. Menurut Desmon perasaan kecewa tengah menyelimutinya karena jagoan dalam Pemilihan Kepala Daerah Jakarta kalah. Desmon memilih pasangan Calon Nomor Urut 2 dan harapannya sirna seketika saat pasangan calon yang dipilihnya kalah diputaran kedua. Hal serupa juga dijumpai oleh Indah. Menurut Indah Anies Baswadan tidak berpegang teguh dengan perkataannya beberapa tahun lalu. Anies sama sekali tidak memerjuangkan nilai-nilai idealismenya. Sedangkan Ahok, tentu saja tidak semestinya membicarakan agama lain yang bisa memicu isu sara.

Terakhir dibidang evaluatif, tindak lanjut dari Pemilihan Kepala Daerah Jakarta, semua informan sangat menyayangkan berkembangnya isu yang ada. Menurut Giza isu SARA yang gulirkan membuatnya sedih, sangat disayangkan Agama dijadikan kendaraan politik. Meskipun masih adanya ikatan primordialisme yang ada, tidak semestinya harus diangkat keranah publik. Biarkan kita memilih sesuai dengan kehendak hati kita. Disisi lain, Desmon sudah tidak mempunyai harapan terhadap Pasangan Calon yang terpilih. Moh. Bagus melontarkan harapannya semoga pemimpin yang terpilih bisa amanah

dan melanjutkan program-program yang baik, melakukan inovasi serta adanya perbaikan-perbaikan infrastruktur, sarana dan prasarana yang lebih objektif.

b. Bentuk Budaya Politik Masyarakat Betawi Cengkareng

Masyarakat Betawi Cengkareng memiliki ciri khas tersendiri, karena menurut Achmad Rifai selaku ketua RT dan Key Informan hanya masyarakat Betawi Cengkareng saja yang mempertahankan nilai-nilai budayanya. Sistem Religi dari masyarakat Betawi Cengkareng masih sangat kental, hal ini juga yang mempengaruhi sejauh mana masyarakat Betawi Cengkareng dalam memilih pemimpin Jakarta. Berdasarkan hasil persentase Rekapitulasi pemungutan suara di Jakarta ternyata masyarakat Betawi Cengkareng tidak mendominasi, namun hasil perbandingan antara suara Masyarakat Betawi Cengkareng dengan Masyarakat DKI Jakarta mempunyai hasil yang sama yaitu Kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno.

Nilai Religi pada saat Pemilihan Kepala Daerah Jakarta merupakan faktor utama dalam memilih Pemimpin di DKI Jakarta, khususnya Masyarakat Betawi Cengkareng hal ini bisa dibuktikan dari hasil wawancara dan fenomena yang terjadi di lapangan, contohnya H. Sadeli memilih Pemimpin DKI Jakarta karena Peci yang di pakai pasangan calon tersebut, hal ini membuktikan kesamaan latar belakang sistem Religi yang dimiliki. Sedangkan informan yang bernama Desmon juga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang notabene mempunyai sistem Religi yang sama juga. Pada saat Pemilihan

Kepala Daerah Jakarta angka partisipasi politik Masyarakat Betawi Cengkareng cukup tinggi karena pada saat Pemilihan Kepala Daerah Jakarta putaran pertama sebanyak 78% orang menggunakan hak suaranya dan pada putaran kedua angkanya meningkat menjadi 79,3%.

Bentuk budaya politik masyarakat Betawi Cengkareng sudah mengarah ke Partisipan. Hal ini bisa dibuktikan karena informan sudah ikut aktif. Desih Yanah pada saat Pemilihan Kepala Daerah menjadi Saksi, Desmon Menjadi Petugas Pengawas Pemilu. Diluar Pemilihan Moh. Bagus ikut organisasi Pemida Pancasila, FBR, Majelis Rasulullah dan pernah memberikan tekanan kepada Pemerintah ketika menjabat sebagai Staf Ahli salah satu anggota Dewan, H. Sadelih pernah ikut dalam kegiatan partai Golongan Karya.

c. Bentuk Partisipasi Masyarakat Betawi Cengkareng

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipandang sebagai terobosan politik yang sangat baik, terlebih dari perkembangan politik daerah dan otonomi daerah. Pada tahun 2017 ini Indonesia melaksanakan Pilkada Serentak gelombang kedua yang pesertanya ada dari Jakarta, Banten dan daerah-daerah lainnya. Hal tersebut tidak serta-merta membagi konsentrasi kebeberapa wilayah. Fokus utama masyarakat pastinya Pilgub DKI Jakarta.

Dilihat dari segi aspek ciri-ciri negara demokrasi adanya pemilihan umum, dan di Indonesia asas yang digunakan adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Agar Pemilihan Kepala Daerah Jakarta bisa membuat konsensus politik yang dimana masyarakat mempunyai kekuasaan untuk

menentukan sendiri siapa calon pasangannya. Setelah disahkannya undang-undang terkait pilkada serentak pada 18 Maret 2015. Pengesahan yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 dan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015, mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta tentang Pemerintahan daerah.³⁶

Jadi untuk mengefesiensikan Pilkada nanti semoga pada tahun 2020-an Indonesia bisa melaksanakan Pilkada Secara Serentak. Namun harus ada tahapan dan gelombang yang dilalui. DKI Jakarta masuk ke dalam gelombang kedua yang dimana dilaksanakan Pemilihan Gubernur pada tahun 2017. Sebelumnya sudah ditetapkan ketiga Pasangan Calon yang berhasil lolos berkas verifikasi, yaitu:

1. Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni
2. Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat
3. Anies Baswedan-Sandiaga Uno

DKI Jakarta masuk pada gelombang kedua yang berarti dilaksanakan pada Tahun 2017. Sejak bulan Maret 2016 KPU DKI Jakarta telah sibuk menyiapkan Pilgub DKI Jakarta. Adapun jadwal yang diresmikan oleh KPU DKI Jakarta. 19 September-21 September 2016, Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur. 22 Oktober 2016, Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur. 26 Oktober 2016-11 Februari 2017, Masa Kampanye dan Debat Publik. 12 Februari-14 Februari 2017, Masa Tenang. 15 Februari 2017, Pemungutan dan Penghitungan Suara. 16 Februari-27 Februari 2017,

³⁶ <http://detik.com>, diakses pada tanggal 31 Maret 2017

Rekapitulasi Suara. 8 Maret-10 Maret 2017, Penetapan Calon Terpilih Tanpa Sengketa.

Pada saat kampanye berlangsung ketiga Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur memberikan visi, misi dan program kerjanya. Berikut visi, misi ketiga Paslon:

Tabel 7: Visi dan Misi Pasangan Calon

No	Pasangan Calon Gubernur DKI Jakarta	Visi	Misi
1	Agus Harimurti Yudhoyono- Sylviana Murni	Menuju Jakarta tahun 2022 yang lebih maju, aman, adil dan sejahtera	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Jakarta yang maju 2. Mewujudkan Jakarta yang aman 3. Mewujudkan Jakarta yang adil 4. Mewujudkan Jakarta yang sejahtera 5. Mewujudkan Jakarta hijau (<i>Green Jakarta</i>) yang lingkungannya semakin baik 6. Mewujudkan Jakarta yang nyaman dan bermartabat.
2	Basuki Tjahaya Purnama-Djarot Saiful Hidayat	Jakarta sebagai etalase kota Indonesia yang Modern, tertata rapi, manusiawi, dan fokus pada pembangunan manusia seutuhnya dengan kepemimpinan yang bersih, transparan, dan profesional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan melayani warga 2. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga. 3. Menciptakan SDM yang tangguh lahir batin, berkompeten, dan berdaya saing global dengan indeks

			<p>pembangunan manusia yang setara dengan kota-kota maju didunia</p> <p>4. Menata kota sesuai perubahan zaman untuk mendukung kemajuan ekonomi, keberlangsungan lingkungan, dan kehidupan sosial budaya warga.</p> <p>5. Membangun kehidupan kota yang berbasis teknologi dan berinfrastruktur kelas dunia dengan warga yang berketuhanan, berbudaya, bergotong rotong, berwawasan dan toleran</p>
3	Anies Baswedan-Sandiaga Uno	Jakarta kota maju dan beradab dengan seluruh warga merasakan keadilan dan kesejahteraan	<p>1. Membangun manusia Jakarta menjadi warga yang berdaya dengan menghadirkan kepemimpinan yang humanis serta menganyomi, penggerak birokrasi yang efektif, menjaga stabilitas dan keterjangkauan harga bahan pokok, membangun sektor kesehatan, pendidikan, kebudayaan serta menyelesaikan masalah-masalah sosial.</p> <p>2. Membangun lingkungan kota Jakarta secara</p>

			berkelanjutan dengan perencanaan yang memperhatikan daya dukung lingkungan dan sosial. 3. Membangun kesejahteraan dengan menciptakan lapangan pekerjaan, pembangunan infrastruktur dan penanggulangan masalah mobilitas warga kota
--	--	--	---

Sumber KPU Kecamatan Cengkareng tahun 2017

Pada saat Pilkada Putaran pertama KPU DKI Jakarta menetapkan pasangan yang bisa bersaing di Pilkada DKI Putaran kedua adalah pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat dengan pasangan Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno. Kedua pasangan tersebut dinyatakan menjadi calon pada putaran kedua sesuai surat keputusan KPU DKI Jakarta mengenai rekapitulasi hasil perhitungan suara. Dalam rapat pleno yang dilakukan KPU juga memberikan hasil rekapitulasi final putaran pertama dengan Perolehan Pasangan Calon Nomor urut satu, Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni memperoleh jumlah 937.955 Suara (17,07%). Pasangan Calon nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat memperoleh 2.364.577 Suara (42,99%). Terakhir Pasangan Calon nomor urut tiga memperoleh 2.197.333 Suara (39,95%).³⁷

Kemudian Hasil Perolehan suara untuk daerah di Kecamatan Cengkareng yang meliputi dari 6 kelurahan dan 600 TPS adalah sebagai berikut:

³⁷ Sumber KPU Daerah Jakarta tahun 2017

Tabel 8: Jumlah Perolehan Suara Putara Pertama Pemilihan Kepala Daerah Jakarta Wilayah Cengkareng

No	Pasangan Calon	Jumlah Suara	Persentase
1	Agus Harimurti Yudhoyono – Sylvina Murni	44.378	16,67%
2	Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Saiful Hidayat	130.592	49,04%%
3	Anies Rasyid Baswedan – Sandiaga Salahudin Uno	91.309	34,29%
Total		266.279	100%

Sumber: KPU Kecamatan Cengkareng tahun 2017

Kemudian perbandingan pemilih dan pengguna hak pilih di Kecamatan Cengkareng adalah untuk laki-laki Pemilih sebanyak 171.759 dan pengguna hak pilih sebanyak 129.462. Sementara jumlah pemilih pada perempuan sebanyak 167.112 dan jumlah pengguna hak pilih 133.756. Persentase angka partisipasi, baik laki-laki dan perempuan, sebanyak 22% orang tidak memilih dan 78% orang memilih.³⁸

Pada saat Pilkada Putaran kedua KPU DKI Jakarta mengesahkan hasil rekapitulasi penghitungan dan pemenangnya adalah pasangan Calon nomor urut tiga dengan Perolehan, Pasangan Calon nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat memperoleh 2.350.366 Suara (42,04%). Sedangkan Pasangan Calon nomor urut tiga memperoleh 3.240.987 Suara (57,96%). Total suara sah sebanyak 5.591.353 suara (100%).³⁹

Hasil Perolehan suara putaran kedua untuk kecamatan Cengkareng yang meliputi 6 kelurahan dan 600 TPS, sebagai berikut:

³⁸ Sumber KPU Daerah Jakarta tahun 2017

³⁹ Sumber KPU Daerah Jakarta Tahun 2017

Tabel 9: Jumlah Perolehan Suara Putatan Kedua Pemilihan Kepala Daerah Jakarta Wilayah Cengkareng

No	Pasangan Calon	Jumlah Suara	Persentase
2	Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Saiful Hidayat	130.330	46,91%%
3	Anies Rasyid Baswedan – Sandiaga Salahudin Uno	147.525	53,09%
Total		277.855	100%

Sumber: KPU Kecamatan Cengkareng tahun 2017

Kemudian perbandingan pemilih dan pengguna hak pilih di Kecamatan Cengkareng adalah untuk laki-laki Pemilih sebanyak 177.101 dan pengguna hak pilih sebanyak 136.173. Sementara jumlah pemilih pada perempuan sebanyak 172.643 dan jumlah pengguna hak pilih 140.656. Persentase angka partisipasi, baik laki-laki dan perempuan, sebanyak 20,7% orang tidak memilih dan 79,3% orang memilih.⁴⁰

d. Pengaruh Sistem Religi dalam Partisipan Masyarakat Betawi Cengkareng

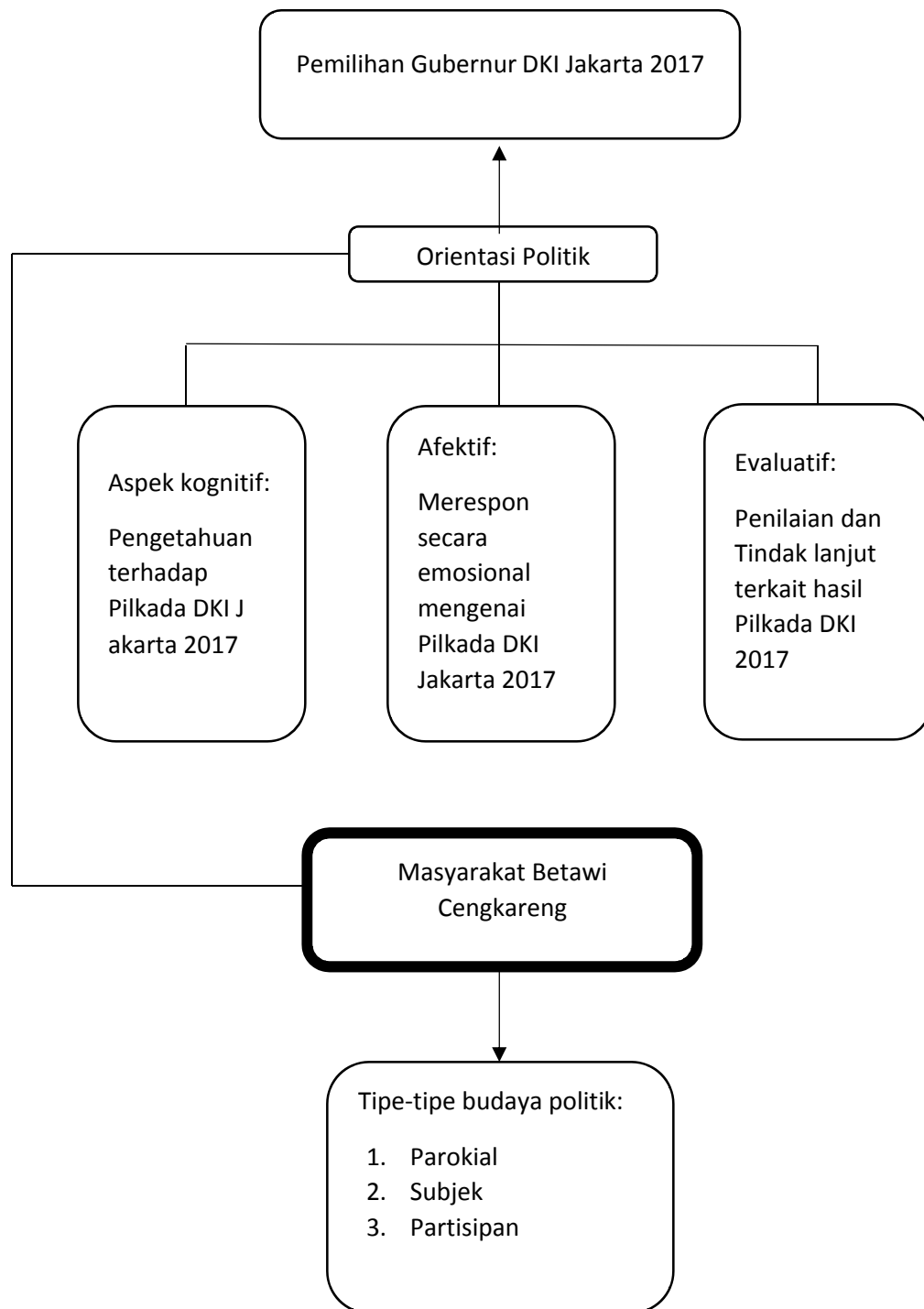
Hasil temuan dibidang Sistem religi sudah jauh dari pandangan. Begitu kentalnya primordialisme dan etnosentrisme membentuk sistem religi sangat berpengaruh ketimbang faktor adat istiadat. Menurut Dendi Isu SARA terkait Agama sangat berpengaruh dalam Pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2017, terlebih ada beberapa oknum yang memanfaatkan situasi seperti ini untuk dijadikan alat politik. Menurut Moh. Bagus isu Agama dijadikan alat untuk menjatuhkan. Respon Bagus terhadap isu tersebut berusaha untuk menghimbau orang-orang disekitar supaya lebih bijak terhadap isu yang berkembang disertai

⁴⁰ Sumber KPU Daerah Jakarta tahun 2017

dengan pemikiran yang objektif. Tanggapan serupa juga diungkapkan oleh Giza, Indah, Desih dan Desmon, menurut mereka isu agama hanya dijadikan alat politik saja. Desih menuturkan isu SARA dan agama ini sangat tidak baik dan bisa membuat masyarakat semakin terpecah belah.

H. Sadeli mengungkap isu SARA yang dilontarkan sah-sah saja asalkan setelah Pemilihan warga atau masyarakat tidak semakin terpecah. Menurutnya pesta demokrasi memang biasanya memakan korban bagi lawan politiknya dan jangan sampai menelan korban politik juga bagi masyarakat.

Semestinya, menurut *Key Informan* A. Sadeli, Ahok tidak menyulut kemarahan umat Islam dengan perkataannya yang sangat menyakiti umat Islam. Ya intinya proses hukum menurut A. Sadeli harus dijunjung tinggi dan Ahok juga sudah menerima sanksi yang setimpal.



Bagan 1. Temuan Penelitian

D. Pembahasan

Dari data-data yang diperoleh selama penelitian, maka peneliti mencoba menganalisis permasalahan yang dibahas pada penelitian ini. Analisis ini diperoleh melalui hasil dari wawancara yang meliputi wawancara dengan informan, wawancara *Key informan*, dan *expert opinion* serta dari hasil pengumpulan data-data yang bisa dijadikan referensi dalam penelitian ini.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa budaya politik merupakan sebuah sistem, nilai dan rasa dari perwujudan sebuah tatanan kehidupan bermasyarakat yang dimana berorientasi pada sebuah sistem politik dan mempunyai beberapa golongan tingkatan seperti parokial, Subjek/Kaula, dan Partisipan.

Menurut teori Almond dan Verba Budaya Politik dibagi ke dalam beberapa orientasi, yaitu Kognitif, Afektif, dan Evaluatif. Berdasarkan hasil wawancara terhadap 10 informan, orientasi politik Masyarakat Betawi Cengkareng meliputi tiga aspek, sebagai berikut:

1. Aspek Kognitif.

Aspek Kognitif Masyarakat Betawi Cengkareng terhadap Pilkada DKI Jakarta sangat baik karena 9 dari 10 informan mengetahui apa Visi, Misi dan Program kerja hingga strategi Pasang Calon Gubernur. Hanya H. Sadelih yang tidak mengetahui hal tersebut, padahal dari hasil wawancara H. Sadelih pernah bergabung dalam Partai Politik yaitu Partai Keadilan Sejahtera. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Masyarakat sudah mulai

paham mengenai Pendidikan politik, khususnya Orentasi politiknya. Menurut Mohammad Bagus I Visi, Misi dan Program kerja Pasangan Calon sangat mudah untuk di ingat khususnya Program kerja Pasangan Calon Nomor urut 3 yaitu “OKE OCE”, menawarkan solusi bagi warga Jakarta dengan lebih konkret, melakukan *direct seling* dan *door to door*.⁴¹

2. Aspek Afektif

Perbandingan hasil informan 9 dari 10 orang bisa memberikan jawaban mengenai perasaan terhadap Pasangan Calon Gubernur, hanya Akmal Permatasari yang tidak memberikan jawabannya mengenai perasaan terhadap Pasangan Calon Gubernur. Menurut H. Sadelih :

*“Perasaan saya terhadap calon-calon memang beda. Contohnya Ahok memang punya hasil meski tidak 100% tetapi setidaknya pekerjaan yang dilakukan Ahok membuahkan hasil yang nyata. Mungkin masih banyak yang memilih dia karna alasan itu. Ahok juga membangun tidak sendiri melainkan bersama semua golongannya. Perasaan saya terhadap Pasangan Calon yang memakai peci, saya melihat orang nya adem dan istrinya juga kalau tidak salah berasal dari Betawi jadi saya agak respek sama Dia.”*⁴²

3. Aspek Evaluatif

Untuk aspek evaluatif hampir semua informan dan kedua *key informan* memberikan jawaban mengenai harapan-harapan terhadap Pasangan Calon yang terpilih. Hanya Desmoon saja yang tidak bisa memberikan jawabannya karena Pasangan Calon yang dipilihnya tidak menang. Hal ini bisa dikatakan hampir semua masyarakat Betawi

⁴¹ Wawancara dengan Informan

⁴² Wawancara dengan Informan

Cengkareng mempunyai nilai tindak lanjut terhadap hasil Pilkada DKI Jakarta, yaitu berupa harapan-harapan untuk Pasangan Calon yang terpilih.

Berdasarkan hasil analisis diatas mengenai orientasi politik masyarakat Betawi Cengkareng menunjukkan penilaian yang memuaskan, baik dari segi kognitif, aspek afektif, dan aspek evaluatif. Hasil temuan penelitian mengenai angka partisipasi politik masyarakat Cengkareng cukup tinggi, yaitu diatas 75%. Hal ini menunjukkan lebih dari $\frac{3}{4}$ masyarakat turut andil dalam pemungutan suara, namun menurut M. Khalis, selaku *Expert Opinion*, mengungkapkan bahwa ada indikasi partisipasi yang ada masih bersifat mobilisasi. Jika dahulu partisipasi dimobilisasi oleh *money politik*, maka pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 ini masyarakat yang memberikan suaranya dimobilisasi oleh yang namanya isu SARA dan Perang antar RAS. Dogma Agama yang begitu kuat membuat banyak oknum yang mencari kesempatan dengan mempolitisasi isu tersebut. Menurut beliau agama dijadikan alat untuk menakut-nakuti sebagian masyarakat sehingga untuk beberapa kalangan cara tersebut sangat ampuh untuk menarik simpatisan suarat.⁴³

Masyarakat Betawi Cengkareng mempunyai tipe budaya politik yang condong ke Partisipan, meskipun masih ada beberapa orang yang mempunyai sikap apatis. Hal ini bisa dibuktikan dengan kedua Key Informan yang masuk organisasi, ada informan yang pernah memberikan kritikan kepada Pemerintah. Dari teori yang diungkapkan Almond dan Verba tipe budaya politik partisipan merupakan bentuk kultur yang dimana setiap anggota masyarakat secara

⁴³ Wawancara Expert Opinion

eksplisi terhadap aspek input dan output dari sistem tersebut. Teori ini diperkuat oleh pendapat *Expert Opinion* yang dimana pada Pilkada DKI Jakarta 2017 ini banyak masyarakat yang ikut andil dan melaksanakan hak politiknya serta mengawasi jalannya Pilkada.

Pada saat Pilkada DKI Jakarta 2017, isu yang dominan adalah SARA, hal ini membuat semua orang menyampaikan aspirasinya dan juga menggunakan hak politiknya. Isu tersebut membuat perpecahan tidak hanya didalam masyarakat DKI Jakarta, namun untuk masyarakat Luar Jakarta juga ikut menyampaikan aspirasinya. Contoh konkretnya adalah adanya Aksi Damai yang berjilid oleh Agama terbesar di Indonesia. Hasil dari Pilkada tersebut memberikan warna yang baru karena melahirkan Pemimpin yang tidak disangka-sangka menang. Memang Menurut Pak Khalis, “Jakarta ini mayoritas Muslim dan pastinya yang akan menang pasti dari golongan muslim, hal itu memang lumrah, terlebih Ahok yang dari luar Muslim pernah menghina Al-Quran yang jelas-jelas merupakan Pedoman untuk umat muslim.

Selanjutnya Pak khalis menyarankan kepada semua masyarakat untuk menyikapi isu SARA dengan lebih bijak dan memberikan pandangan dengan yang lebih objektif. Menurut beliau, meskipun Indonesia, termasuk Jakarta, bermayoritas muslim, namun ini adalah negara yang mempunyai semboyan “Bhineka Tunggal Ika”. Jadi bagaimanapun siapa saja boleh maju menjadi Pemimpin, tanpa terkecuali, yang terpenting lulus syarat administrasi dan verifikasi dari KPU.

E. Keterbatasan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini banyak kendala yang dihadapi dilapangan serta dalam merangkum dan menyambungkan teori ke teori lain sedikit sulit. Adapun beberapa kendala-kendalanya, yaitu pertama, sulitnya untuk mewawancarai informan karena mereka sibuk dengan aktifitasnya, mulai dari Pelajar hingga ke Ibu Rumah Tangga. Kedua, banyak data yang sulit didapatkan, karena fokus penelitian di sini menjadi hal yang sensitif ditambah lagi Pilkada DKI Jakarta menjadi dua putaran yang mengharuskan untuk dua kali terjun kelapangan.

Skripsi ini memang menitik beratkan pada Budaya Politik pada Pilkada DKI Jakarta 2017, namun hasil dari penelitian hanya bisa digambarkan secara wilayah untuk masyarakat Betawi Cengkareng saja, mungkin ada penelitian serupa yang menggambarkan kondisi masyarakat yang lain.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hikmah dan pelajaran yang didapatkan. Dengan segala kerendahan hati tulisan skripsi ini mempunyai banyak sekali keterbatasan sehingga mungkin ada beberapa bagian yang kurang tajam dideskripsikan serta untuk juga menganalisa Budaya Politik Masyarakat Betawi Cengkareng dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pilkada DKI Jakarta 2017 memang telah menyisahkan bekas bagi masyarakatnya, termasuk Masyarakat Betawi Cengkareng. Pada Pilkada Tersebut proses Demokrasi terjadi, karena pada hakekatnya Demokrasi ialah dari, oleh, dan untuk rakyat. Pemilihan Kepala Daerah memberikan ruang gerak kepada masyarakat luas untuk menyalurkan hak politiknya dengan memilih seorang Pemimpin, tanpa adanya campur tangan (intervensi) maupun intimidasi dari seseorang.

Pilkada merupakan sebuah proses dalam mencari Pemimpin dan Rakyat adalah sebuah angka yang diperebutkan. Pemilih dituntut agar lebih celih memilih Pemimpinnya. Disinilah aspek kognitif dari orientasi Politik harus digunakan, karena pengetahuan mengenai pendidikan politik dan Pasangan Calon Pemimpin.

Terkait dengan permasalahan dari hasil penelitian yang ada serta penyabaran dari bab-bab yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan beberapa hal. *Pertama*, terkait mengenai orientasi politik, ada tiga aspek yang di teliti yaitu kognitif, afektif dan evaluatif. Ketiga Aspek tersebut menggambarkan masyarakat Betawi Cengkareng sudah cukup baik, karena hampir sebagian informan bisa menjawab pertanyaan mengenai ketiga aspek tersebut.

Kedua, Angka partisipasi dimasyarakat Betawi Cengkareng sudah cukup tinggi yaitu diatas 75%. Hal ini bisa dikatakan $\frac{3}{4}$ masyarakat menggunakan hak suaranya dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, namun hal tersebut masih bersifat mobilisasi. Jika pada Pilkada sebelumnya *Money Politic* dijadikan senjata yang paling ampuh namun pada Pilkada sekarang ini Isu SARA yang menyangkut sistem Religi dijadikan alat mobilisasi bagi masyarakat khususnya Betawi Cengkareng.

Ketiga, masyarakat Betawi Cengkareng lebih condong pada tipe budaya politik partisipan, meskipun ada beberapa orang yang masih bersikap acuh tak acuh. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan adanya beberapa orang yang tidak hanya memberikan nilai input, melainkan output dari suatu kebijakan yang dibuat. Pada Pilkada DKI Jakarta semua lapisan golongan masyarakat termasuk Betawi Cengkareng turut andil dan mengawasi jalannya Proses Pemungutan Suara hingga hasil rekapitulasi.

Keempat, Faktor sistem religi sangat mempengaruhi masyarakat Betawi Cengkareng dalam memilih Pasangan Calon pada Pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2017. Faktor sistem religi mempengaruhi pasalnya gulirkannya isu yang berbau SARA yang dimana masyarakat Jakarta, khususnya Betawi Cengkareng sangat sensitif dengan isu tersebut, terlebih fakto sistem religi lebih kuat ketimbang faktor adat istiadat.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan diatas, budaya politik masyarakat Betawi Cengkareng pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lebih condong kedalam tipe budaya politik partisipan dan implikasinya bagi masyarakat Betawi Cengkareng adalah mempunyai pendidikan politik yang lebih matang dan menumbuhkan kesadaran politik yang cukup baik, serta angka partisipan yang tinggi merupakan hasil dari budaya politik yang dimana hampir semua masyarakat menggunakan hak politiknya namun hal tersebut masih bersifat mobilisasi, tidak otonom

C. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan dan implikasi yang di ungkapkan maka dalam kaitan ini peneliti memberikan sarannya, sebagai berikut :

1. Bagi Masyarakat Betawi Cengkareng harus lebih bijak dalam memilih pemimpin serta menanggapi isu yang beredar. Seharusnya pemikiran masyarakat Betawi Cengkareng harus lebih objektif.
2. Angka partisipasi yang tinggi ternyata tidak sebanding dengan kualitas politik yang ada. Hal ini disebabkan karena adanya indikasi dari isu SARA yang memobilisasi suara pemilih, alangkah baiknya jika masyarakat Betawi Cengkareng tidak hanya sebatas SARA melainkan juga dilihat dari segi *track record*, Visi, Misi serta Program Kerja Pasangan Calon.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Almond, Gabriel A. dan Sidney Verba. 1984. *Budaya Politik Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. (terjemahan Sahat Simamora). Jakarta: Bina Aksara.
- Alfian dan Nazaruddin S. 1991. *Profil Budaya Politik Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Budiardjo, Miriam. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Elly M. Setiadi dan Oesman Kolip. 2013. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Huntington, Samuel P dan Joan Nelson. 1994. *Pasrtisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kantaprawira, Rusadi. 2006. *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru.
- Prihatmoko. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahman, Ahmad. 2012. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Graha Ilmu
- Romli, Lili. 2007. *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sahid, Komarudin. 2011. *Memahami Sosiologi Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Sastriatmodjo, Sudiono. 1995. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Semarang: UNNES Semarang
- Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. *Prilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Perss
- Sjamsudin, Nazarudin. 1991. *Profil Budaya Politik Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Utana Graffiti
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Grafindu Persada

Dokumen:

Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta, 2017. Hasil Rekapitulasi Pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2017.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. DPR Press

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dokumen Kantor Kecamatan Cengkareng 2017 tentang Luas Wilayah Kecamatan Cengkareng

Badan Pusat Statistik Jakarta Barat mengenai Sensus Penduduk tahun 2015

Sumber Internet

<http://detik.com>, diakses pada tanggal 31 Maret 2017

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

Nama : Rezandi Sabilla

NIK : 4115133771

Judul : BUDAYA POLITIK MASYARAKAT BETAWI CENGKARENG (BECENG)

(Studi Kasus PilGub DKI Jakarta 2017)

Definisi Konseptual : budaya politik merupakan sebuah sistem, nilai, dan rasa dari perwujudan sebuah tatanan kehidupan bermasyarakat yang dimana berorientasi pada sebuah sistem politik dan mempunyai beberapa golongan tingkatan, seperti parokial, subjek/aula, dan partisipan.

Definisi Operasional :

- Budaya politik diartikan sebagai orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif yang dimiliki oleh masyarakat Betawi Cengkareng '*Beceng*'
- Kognitif merupakan sebuah pengetahuan masyarakat '*Beceng*' dalam menjawab persoalan mengenai Pilgub DKI Jakarta 2017
- Afektif adalah kemampuan masyarakat '*Beceng*' menanggapi secara emosional terhadap Pilgub DKI Jakarta 2017
- Evaluatif merupakan tanggapan masyarakat '*Beceng*' sebagai reaksi lanjutan dalam hasil Pilgub DKI Jakarta 2017

NO	ASPEK	DIMENSI	INDIKATOR
1.	Orientasi Budaya Politik	Kognitif	1. Pengetahuan mengenai isu Pilkada DKI Jakarta 2017. 2. Pengetahuan mengenai Program kerja Calon Gubernur DKI Jakarta. 3. Kepercayaan terhadap Calon Gubernur DKI Jakarta yang akan dipilih.
		Afektif	1. Perasaan Masyarakat <i>Beceng</i> mengenai Calon Gubernur DKI Jakarta 2. Menanggapi secara emosional terhadap isu kandidat Gubernur DKI Jakarta
		Evaluatif	1 Memberikan respon terhadap hasil Pilkada DKI Jakarta 2017 2 Merespon terhadap terpilihnya kandidat Gubernur DKI Jakarta

2.	Tipe Budaya Politik	Parokial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika diukur, angka orientasi masyarakat atau individu terhadap pemerintahan mendekati bahkan nol (0), 2. Tidak mempunyai peran-peran politik yang terkhususkan di dalam kehidupan bermasyarakat, 3. Tidak mempunyai harapan lebih terhadap perubahan apapun di dalam sistem politik yang ada, 4. Angka Partisipasi rendah karena faktor pengetahuan (Kognitif) yang kurang, 5. Parokialisme lebih bersifat afektif dan normatif ketimbang kognitif.
		Subyek / Kaula	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat frekuensi orientasi politik yang tinggi terhadap sistem politik, tetapi frekuensi orientasi terhadap obyek-obyek input dan output secara keseluruhan masih rendah, 2. Masyarakat subyek menyadari akan otoritas pemerintah. 3. Hubungannya terhadap sistem politik secara umum masih bersifat sedikit pasif. 4. Orientasi subyek lebih bersifat afektif dan normatif daripada kognitif. 5. Kompetensi politik dan keberdayaan politik yang rendah.
		Partisipan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada kaum partisipan dimana perhatian dan intensitas terhadap masukan maupun keluaran dari sistem politik sangat tinggi, 2. Menganggap dirinya sebagai anggota politik yang aktif, 3. Menggunakan hak-hak politiknya, sehingga tidak menerima begitu saja keputusan yang ada. 4. Masyarakat berperan sebagai aktivis. 5. Mempunyai angka partisipasi yang tinggi dikarenakan faktor kognitif